



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN
PEMBERDAYAAN INDUSTRI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

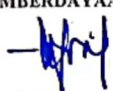
No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	- Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	- 9.55
	Keg Meningkatkan Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPPIP)	- Persentase Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPPIP)	- 100
	Sub.keg Tersusunnya dokumen FS Kawasan Industri	- Jumlah dokumen FS Kawasan Industri yang tersusun	- 1
	Sub.keg Meningkatkan daya saing industri melalui standarisasi industri	- Jumlah pelaku industri yang meningkat daya saingnya	- 80
	Sub.keg Terbinanya dan terfasilitasinya Pelaku usaha industri	- Jumlah pelaku usaha industri yang mendapat pembinaan dan terfasilitasi	- 170
2	Meningkatnya pemanfaatan Pengelolaan SIINas	- Persentase peningkatan perusahaan industri Besar dan perusahaan Kawasan Industri lintas Kab/Kota yang masuk dalam SIINas	- 87
	Keg Meningkatkan Pengelolaan SIINas	- Persentase data informasi Industri kewenangan provinsi yang masuk SIINas	- 10
	Sub.keg Terpenuhi Data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Jumlah data dan informasi industri yang dikeluarkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- 2
	Sub.keg Terpenuhi Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui (SIINas)	- Terpublikasinya data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- 1
	Sub.keg Terpantaunya kepatuhan perusahaan dalam melakukan pelaporan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Jumlah perusahaan yang telah melakukan pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- 134

1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1,605,812,050	APBD
	Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 1,605,812,050	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	= Rp. 1,061,276,800	
	Sub.keg Meningkatkan daya saing industri melalui standarisasi industri	= Rp. 184,551,050	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	= Rp. 359,984,200	
2.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	= Rp. 187,048,500	APBD
	Keg Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	= Rp. 187,048,500	
	Sub.keg Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	= Rp. 54,008,650	
	Sub.keg Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	= Rp. 87,723,300	
	Sub.keg Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penvampaan Data ke SIINas	= Rp. 45,316,550	

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Plh. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

MIRA YULASTUTI, ST.MP
Nip. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

MIRA YULASTUTI, ST.MP
Nip. 19730831 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831/200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE
NIP. 19661028 199203 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perindustrian dan Perdagangan	- INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	- 66
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- 1 Dokumen
	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	- 60
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- 14 Laporan
	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	- Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	- 60
	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	- Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	- 60
	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	- Indeks SPBE Perangkat Daerah	- 60
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	- Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	- 60
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	- Tingkat Digitalisasi Perangkat Daerah	- 62
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- 1 Laporan

Program

Anggaran

Keterangan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Kegiatan**
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

= Rp. 17.001.172.143 APBD

= Rp. 658.460.300 APBD

= Rp. 14.430.057.683 APBD

= Rp. 255.093.700 APBD

= Rp. 172.493.100 APBD

= Rp. 389.828.840 APBD

= Rp. 43.747.400 APBD

= Rp. 586.966.820 APBD

= Rp. 464.524.300 APBD



Palu, 20 Februari 2024

PIHAK PERTAMA
SEKERTARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

HJ. MAHNI JOTOLEMBAH, SE
Nip. 19661028 199203 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO MARDIONO, S.T., M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

EKO MARDIONO, S.T., M.A.P
NIP. 19770302 201001 1 008

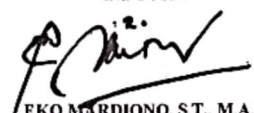
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Meningkatkan Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	- Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	- 9.55
	Keg Meningkatkan Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)	- Persentase Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)	- 100
	Sub.keg Terlaporkannya hasil fasilitasi bina industri	- persentase fasilitasi bina industri	- 100
	Terfasilitasinya pendampingan pengyusunan draf dokumen teknis RPIK	Jumlah laporan pendampingan pengyusunan draf dokumen teknis RPIK	- 2
	Terevaluasi hasil penerapan kebijakan industri	Jumlah dokumen evaluasi penerapan kebijakan industri	- 4
	Terevaluasinya pelaksanaan rencana pembangunan industri yang merupakan turunan dari RPIP	Jumlah dokumen Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- 2
	Sub.keg Terbinanya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Industri	- Jumlah Laporan Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Alam Untuk Industri	- 1 Dokumen
	Terbinanya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Program Vokasi	- 1 Dokumen
2	- Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	- Presentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri	- 71%
	Keg Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	- Presentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri	- 71%
	Sub.keg Terselenggaranya Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian kewenangan provinsi	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terselenggaranya Pengendalian terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian berbasis risiko	Jumlah dokumen hasil Pengendalian terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian berbasis risiko	- 1 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 502,556,150	APBD
Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 502,556,150	
Sub.keg Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	= Rp. 217,005,600	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	= Rp. 285,550,550	
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	= Rp. 247,829,900	APBD
Keg Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	= Rp. 247,829,900	
Sub.keg Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	= Rp. 109,795,900	
Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	= Rp. 138,034,000	

Palu, 20 Februari 2024


PIHAK KEDUA
PIH. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA
INDUSTRI

EKO MARDIONO, S.T., M.A.P
NIP. 19770302 201001 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Tentang ketentuan perdagangan	- Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi ketentuan perdagangan	- 100%
	Keg. Meningkatkan proses penerbitan rekomendasi teknis Bahan Berbahaya bagi distribusi sesuai standar	- Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani	- 100%
	Sub.keg Terlayannya permohonan Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi Distributor melalui layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Persentase Permohonan Rekomendasi SIUP-MB dan B2 yang terlayani	- 100%
2	- Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan yang sesuai standar	- Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	- 10%
	Keg. Meningkatkan ketersediaan sarana distribusi perdagangan dan pasar lelang komoditas sesuai dengan standar	- Persentase sarana prasarana perdagangan sesuai standar	- 10%
	Sub.keg Terbinanya Pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	- Jumlah pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	- 1 Pasar Rakyat Kab/kota
	Sub.keg Terbinanya Penjual dan Pembeli yang difasilitasi di Pasar Lelang Komoditas	- Jumlah Penjual dan Pembeli yang difasilitasi di pasar lelang komoditas	- 2 Pelaku Usaha/Tahun
3	- Meningkatkan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	- Persentase Stabilisasi harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (koefisien variasi harga 4-6%)	- 4-6 %
	Keg. Meningkatkan jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- 100%
	Sub.keg Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	- 12 Laporan Bulanan
	Keg. Meningkatkan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	- Persentase Kinerja Kontributor SP2KP Kab/Kota per bulan	- 90%
	Sub.keg Tersusunnya Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Jumlah Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- 12 Dokumen
	Sub.keg Terpenuhnya Operasi Pasar Bersubsidi dalam rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	- Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Pokok	- 8 Kegiatan/Tahun
	Keg. Meningkatkan kualitas pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi	- Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	- 90%
	Sub.keg Tersusunnya data penyaluran pupuk bersubsidi hasil koordinasi dan sinkronisasi	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi	- 4 Laporan/Triwulan
4	- Meningkatkan omzet pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan pemasaran produk dalam negeri	- Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan pemasaran produk dalam negeri	- 10%
	Keg. Meningkatkan omzet pelaku usaha yang diikuti sertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri	- Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikuti sertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri	- 10% Kenaikan Omzet
	Sub.keg Terdampingnya UMKM dalam Bimtek Digital Marketing dan keikutsertaan dalam pameran produk dalam negeri	- Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek Digital Marketing dan keikutsertaan dalam pameran produk dalam negeri	- 50 UMKM

Keg. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri	-	Persentase penggunaan produk dalam negeri	-	10%
Sub.keg Terlatihnya masyarakat dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	60 orang/tahun

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 72,809,000	APBD
Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan	Rp. 72,809,000	
Sub.keg Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	= Rp. 72,809,000	
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp. 145,461,700	APBD
Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi	= Rp. 145,461,700	
Sub.keg Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	= Rp. 89,503,900	
Sub.keg Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	= Rp. 55,957,800	
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	= Rp. 1,855,458,850	APBD
Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	= Rp. 79,266,100	
Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	= Rp. 79,266,100	
Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok	= Rp. 1,726,442,750	
Sub.keg Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	= Rp. 261,768,700	
Sub.keg Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	= Rp. 1,464,674,050	
Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah	= Rp. 49,750,000	
Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	= Rp. 49,750,000	
4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	= Rp. 251,553,750	APBD
Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam	= Rp. 203,081,750	
Sub.keg Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	= Rp. 203,081,750	
Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	= Rp. 48,472,000	
Sub.keg Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Rp. 48,472,000	

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI



DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
NIP. 19770405 200212 1 009





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**

Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**

Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

HAPIT TOLLA,SE
NIP. 19731121 200701 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Kerajinan Daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 66
	- Meningkatkan Fasilitas Layanan /Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	- Meningkatkan Fasilitas Layanan /Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	- 100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 987,535,088	APBD
2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1,013,478,982	APBD

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA
PIH. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



MIRA YULIASTUTI ST.MP
NIP. 49730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN KERAJINAN DAERAH



HAPIT FOLLA SE
NIP. 19731121 200701 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOLVANITA LADJIJI, S.Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

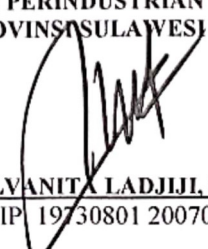
Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



NOLVANITA LADJIJI, S.Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 66
	- Meningkatnya Standardisasi Mutu Barang	- Persentase sertifikat pengujian dan kalibrasi yang diterbitkan	- 100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 3,230,023,634	APBD
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 566,903,615	APBD



Palu, 20 Februari 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG

NOLVANTIA LADJILI S. Ag. M.M
NIP. 19730801 200701 2 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTD Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 66
	- Meningkatnya Perlindungan Konsumen	- Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	- 100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 407,043,480	APBD
2 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 1,195,419,650	APBD



Palu, 20 Februari 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 199903 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. RUSDY MASTURA**
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

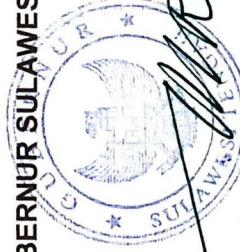
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

MIRA YULIASTUTI, ST.MP

Pembina Tkt.I

NIP. 19730831 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Perdagangan	- Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	7%
		- Laju pertumbuhan Ekspor (Non Migas)	12%
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	41%

Program

	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= Rp. 21,625,774,345	APBD
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 339,309,900	APBD
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp. 145,461,700	APBD
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	= Rp. 1,855,458,850	APBD
5. Program Pengembangan Ekspor	= Rp. 737,239,900	APBD
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 1,762,323,265	APBD
7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	= Rp. 251,553,750	APBD
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 3,121,847,182	APBD
9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	= Rp. 247,829,900	APBD
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	= Rp. 187,048,500	APBD
11. Program Perdagangan Dalam Negeri	= Rp. 231,246,000	APBN
12. Program Perdagangan Luar Negeri	= Rp. 119,676,000	APBN
13. Program Dukungan Manajemen	= Rp. 62,380,000	APBN
14. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	= Rp. 1,310,216,000	APBN

Palu, 13 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



[Signature]

[Signature]

H. RUSDY MASTURA

MIRA YULIASTUTI, ST.MP

Pembina Tkt.I

NIP. 19730831 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURDIANA, SE, MM**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE
NIP. 19661028 199203 2 010

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASSET DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


NURDIANA, SE, MM
NIP. 19731202 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya penyelesaian Tindakanlanjut Hasil Pemeriksaan (TLHIP)	- TLHIP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	- 60
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- 125 Orang/Bulan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	- 1 dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- 500 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- 12 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- 15 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- 5 dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- 14 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 1 dokumen
Keg.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- 14 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- 10 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- 2 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- 1 Laporan
Keg.	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	- INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	- 60
Sub Keg.	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- 4 Unit
Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	- 35 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 110 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- 1 Unit

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp14,430,057,683	
Sub Keg. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp12,306,919,633	
Sub Keg. 2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp1,181,400,000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp554,017,900	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp125,825,200	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp49,787,950	
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp98,649,000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Rp59,528,500	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp53,929,500	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp255,093,700	
Sub Keg. 1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp90,340,000	
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp68,316,000	
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp32,599,700	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp63,838,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp43,747,400	
Sub Keg. 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp43,747,400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp464,524,300	
Sub Keg. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Rp272,784,300	
Sub Keg. 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp133,740,000	
Sub Keg. 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp58,000,000	

Palu, 20 Februari 2024



PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset


NURDIANA, SE, MM
Nip. 19731202 200212 3 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROY EDWARD KUMAAT, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE
NIP. 19661028 199203 2 010

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


ROY EDWARD KUMAAT, SE
NIP. 19820321 200904 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
(1)	(2)	(3)		(4)	
Keg.	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	-	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Rp658,460,300	
Sub Keg. 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp528,414,000	
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp12,825,000	
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp6,050,000	
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp5,725,100	
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp3,750,200	
6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp101,696,000	

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan

H. MAHNILO JOTOLEMBAH, SE
Nip. 19661028 199203 2 010

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program


ROY EDWARD KUMAAT, SE
Nip. 19820321 200904 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

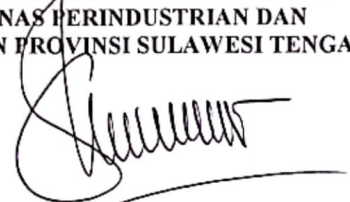
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE
NIP. 19661028 199203 2 010

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP
NIP. 19710906 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)
	Keg.	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	-	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT	- 60
	Sub Keg.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- 4 dokumen
	Sub Keg.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 18 orang
	Sub Keg.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- 42 orang
	Keg.	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- 4 paket
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- 4 paket
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- 4 paket
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- 12 Dokumen
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 76 Laporan
	Keg.	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	-	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	- 60
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	-	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	- 60
		Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	-	TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	- 62
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	-	Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	- 13 Laporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 12 Laporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 4 Laporan

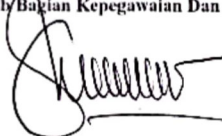
Kegiatan		Anggaran	Keterangan
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kewegawaian Perangkat Daerah		Rp172,493,100	
Sub Keg.	1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp58,381,100	
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp107,512,000	
	3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp6,600,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp389,828,840	
Sub Keg.	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10,060,830	
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp114,204,710	
	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp39,381,400	
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp33,600,000	
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp192,581,900	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp586,966,820	
Sub Keg.	1 Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp300,000	
Sub Keg.	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp421,405,200	
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp165,261,620	

Palu, 20 Februari 2024

PIRAK KEDUA
Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

H. MAHNILO JOTOLEBAH, SE
 Nip. 19661028199203 2 010

PIIAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum



ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP
 Nip. 19710906 199303 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDRIYANI, SE**
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPT PENGAWASAN
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



INDRIYANI, SE
NIP. 19711018 199202 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	- 60
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- 1 Dokumen
Keg.	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	- 1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- 1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Laporan
Keg.	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	- INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	- 60
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	- INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	- 60
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	- TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	- 62
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	- 1 Laporan
Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	- 1 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 5 Unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp251,160,000	
Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp251,160,000	
Sub Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp65,729,780	
Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp21,953,830	
Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp8,313,950	
Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp35,462,000	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp46,956,800	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp45,456,800	
Sub Keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp1,500,000	
Sub Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp43,196,900	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp30,856,900	
Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp12,340,000	

Palu, 20 Februari 2024



PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan
Konsumen

INDRIYANI, SE
Nip. 197110181992022006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PURWATA,SE**
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PEMBERDAYAAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PURWATA,SE
NIP. 19710610 199103 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)		(3)	(4)	
	Keg.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase Pengaduan Konsumen yang terselesaikan	- 100
	Sub Keg.	Terlaksananya Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	-	Jumlah Edukasi PK dan Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	- 4
	Sub Keg.	Terlaksananya Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	-	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Dibina	- 1
	Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	-	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	- 42

- Kegiatan**
- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**
- Sub Keg. 1 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
- 2 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
- 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Anggaran

Rp996,504,850

Rp875,599,950

Rp45,305,000

Rp75,599,900

Keterangan

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen



PURWATA, SE
Nip. 197106101991031005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN N.ALI,SE**
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga Dan Penegakkan Hukum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN
JASA, TERTIB, NIAGA DAN PENEGAKKAN
HUKUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



RIDWAN N.ALI,SE
NIP. 19780531 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
	Keg. Meningkatkan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase barang beredar yang diawasi yang sudah sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	- 100
	Sub Keg. Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	- 2
	Sub Keg. Terlaksananya Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	-	Jumlah Kasus yang Ditangani	- 8

- Kegiatan**
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Keg. 1 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
- 2 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen

Anggaran
Rp198,914,800

Rp119,999,950

Rp78,914,850

Keterangan

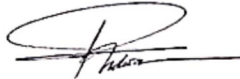
Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen



DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 496911094199903 1 006

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga Dan Penegakkan Hukum



RIDWAN N. ALISE
Nip. 19780531 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIDYAWATI, S.Pt**
Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOLVANITA LADJILI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH



NOLVANITA LADJILI, S. Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WIDYAWATI, S.Pt
NIP. 19750607 200112 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Keg. Meningkatkan pelaksanaan Pengujian mutu komoditi, sertifikasi mutu produk dan kalibrasi alat UPTD PSMB	- Meningkatkan Pengujian mutu komoditi, sertifikasi mutu produk dan kalibrasi alat UPTD PSMB	- 837 sertifikat
	Sub Keg. Terlaksananya Pemantauan Mutu Komoditi	- Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	- 2
	Sub Keg. Terlaksananya Pengembangan Layanan Pengujian	- Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	- 489

Kegiatan
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Produk di Seluruh Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Keg. 1 Pemantauan Mutu Produk
2 Pengembangan Layanan Pengujian

Anggaran

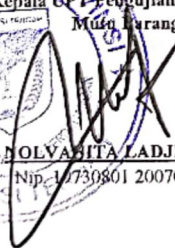
Rp406,332,715.00

Rp105,576,825
Rp300,755,890

Keterangan

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Pengujian Sertifikasi
Mutu Barang


NOLVAJITA LADJILI, S. Ag
Nip. 19730801 200701 2 029

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang


WIDYAWATI, S.Pi
Nip. 19750607 200112 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WULANDARI AGUSTINA, S.Sos., M.A.P**
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOLVANITA LADJIJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



NOLVANITA LADJIJI S.Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPT PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WULANDARI AGUSTINA, S.Sos., M.A.P NIP.
19790319 200903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya penyelesaian Tindakan/ut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- TLHP BPK DAN APIS PERANGKAT DAERAH	- 60
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- 1 dokumen
Keg.	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- 1 paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- 1 paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- 1 paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Laporan
Keg.	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & jasa secara elektronik Perangkat Daerah	- INDEKS TATA KELOLA PIJ PERANGKAT DAERAH	- 60
Sub Keg.	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	- 23 Unit
Keg.	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	- INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	- 60
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	- INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	- 60
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	- TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	- 62
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1 Laporan
Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	- 4 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- 4 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 7 Unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp331,320,000	
Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp331,320,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp177,610,256	
Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3,237,246	
Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp51,150,160	
Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp25,614,850	
Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp97,608,000	
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp2,260,049,730	
Sub Keg. Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp2,260,049,730	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp219,039,648	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp4,998,000	

Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp168,737,496
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp45,304,152
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp242,004,000
Sub Keg.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp4,050,000
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp50,600,000
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp187,354,000



Palu, 20 Februari 2024
PIHAK PETAMA
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
WURUHARI AGUSTINA, S.Sos., M.A.P.
 Nip. 197903192009032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LEVIANA MANGOPO, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Kalibrasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOLVANITA LADJIJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH


NOLVANITA LADJIJI, S. Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KALIBRASI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


LEVIANA MANGOPO, ST
NIP. 19851031 201101 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
(1)	(2)		(3)		(4)	
	Keg.	Meningkatnya pelaksanaan Pengujian mutu komoditi, sertifikasi mutu produk dan kalibrasi alat UPTD PSMB	-	Meningkatnya Pengujian mutu komoditi, sertifikasi mutu produk dan kalibrasi alat UPTD PSMB	-	837 sertifikat
	Sub Keg.	Terlaksananya Pengembangan Layanan Sertifikasi	-	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	-	2
	Sub Keg.	Terlaksananya Pengembangan Layanan Kalibrasi	-	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	-	348

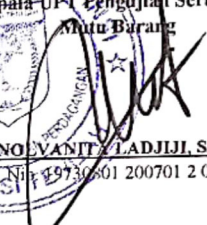
Kegiatan
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keg. 1 Pengembangan Layanan Sertifikasi
2 Pengembangan Layanan Kalibrasi

Anggaran
Rp160,570,900.00
Rp69,321,750
Rp91,249,150

Keterangan

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

NO. YANIT, LADJILI, S. Ag
Nip. 19730601 200701 2 029

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Kalibrasi

LEVIANA MANGOPO, ST
Nip. 19851031 201101 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VERADIAN SAPHIRE,SP,MM**
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**
Jabatan : Kepala UPT Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

HAPIT TOLLA,SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
PRODUK PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

VERADIAN SAPHIRE,SP,MM
NIP. 19750319 199603 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Keg. Meningkatkan Fasilitas Layanan /Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	- Presentase Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	- 100
	Sub Keg. Terlaksananya Jasa Layanan dan Pembinaan bagi Pelaku IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan Serta Jumlah Penerimaan PAD UPT P2IPK	- Jumlah Layanan dan Pembinaan bagi Pelaku IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	- 1044

Kegiatan
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Industri
Provinsi

Sub Keg. 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan
Peran Serta Masyarakat

Anggaran

Rp361,057,540.00

Rp361,057,540

Keterangan

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPT pengembangan produk
industri pangan dan kerajinan
daerah dinas perindustrian dan
dagangan


HAPIT TOLLA, SE
Nip. 19931121 200701 1 009

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan


VERADIAN SAPHIRE, SP, MM
Nip. 19750319 199603 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN. M, ST, MM**
Jabatan : Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HAPIT TOLLA, SE**
Jabatan : Kepala UPT Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

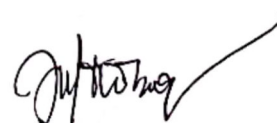
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


HAPIT TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK
PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


RIDWAN. M, ST, MM
NIP. 19680721 201112 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya Fasilitas Layanan /Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	- Presentase Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	- 100
Sub Keg.	Terlaksananya Jasa Layanan dan Pembinaan bagi Pelaku IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan Serta Jumlah Penerimaan PAD UPT P2IIPK	- Jumlah Layanan dan Pembinaan bagi Pelaku IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	- 1044

Kegiatan
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Keg. 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
Masyarakat

Anggaran
Rp1,368,668,588
Rp1,368,668,588

Keterangan

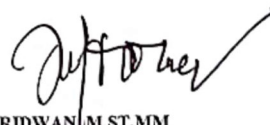
Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPT pengembangan produk
industri pangan dan kerajinan
daerah dinas perindustrian dan
dagangan



HAFIT TOIJA, SE
Nip. 1961121 100701 1 009

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah



RIDWAN M. ST. MM
Nip. 19680721 201112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE**

Jabatan : Kepala Tata Usaha UPT Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HAPIT TOLLA, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



HAPIT TOLLA, SE

NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPT
PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN
DAN KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE
NIP. 19780622 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

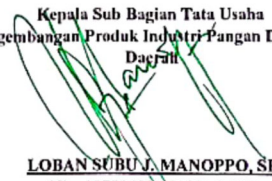
No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	- 60
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- 1 Dokumen
Keg.	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- 2 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- 2 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- 1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	- Jumlah Laporan Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- 1 Laporan
Keg.	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	- INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	- 60
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	- INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	- 60
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	- TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	- 62
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 2 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1 Laporan
Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	- 8 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 40 Unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp555,960,000	
Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp555,960,000	
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp75,310,730	
Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3,165,930	
Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp28,917,800	
Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp8,350,000	
Sub Keg. Fasilitasi kunjungan tamu	Rp12,805,000	
Sub Keg. Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp22,072,000	
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp183,844,358	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp161,944,358	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp21,900,000	
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp172,420,800	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp81,020,000	
Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp91,400,000	

Palu, 20 Februari 2024
PIHAK PETAMA

PIHAK KEDUA
Kepala UPT pengembangan produk industri pangan dan kerajinan daerah

W. H. APRI TOLLA, SE
Nip. 19741121 200701 1 009

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

LOBAN SUBUJ. MANOPPO, SE
Nip. 19780622 201001 1 007